

IRJEN KEMANTAN GELAR RAKORWAS

Penting, Pengendalian Alih Fungsi Lahan

YOGYA (KR) - Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) Dr Jan S Maringka menyampaikan pentingnya percepatan penyelesaian permasalahan alih fungsi lahan pertanian untuk menekan laju alih fungsi lahan pada sejumlah wilayah di Indonesia.



Irjen Kementan Jan S Maringka (tengah) didampingi Idham Samawi menyampaikan keterangan pers.

Hal tersebut disampaikan Irjen Kementan saat memimpin kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Hotel Easparc Yogyakarta, Senin (27/2). Rakorwas melibatkan 200 peserta dari dinas yang membidangi

pertanian, Bappeda, ATR/BPN, Kepolisian, Kejaksaan dan akademisi dari Universitas Gajah Mada. Sesuai data yang dihimpun Inspektorat Jenderal (Ijten) Kementan, dari total luas lahan sawah sekitar 7,46 juta hektare, terdapat 659.200 Ha total alih fungsi lahan sawah de-

ngan rincian 179.539 Ha kondisi terbangun dan 479.661 Ha kondisi perkebunan. Lebih lanjut, Irjen Kementan mengungkapkan, dampak langsung yang diakibatkan alih fungsi lahan berupa hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi infras-

struktur irigasi, kerusakan natural lanskap dan sejumlah masalah lingkungan. "Pada akhirnya, petani dan masyarakat secara umumnya yang paling dirugikan," terang Jan Maringka.

Dengan demikian, menurutnya, perlu upaya khusus dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi terkait alih fungsi lahan.

Wakil Gubernur DIY Paku Alam X (mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X) dalam sambutannya mengungkapkan harapannya, agar ada upaya khusus untuk pengendalian alih fungsi lahan demi menjaga kemandirian dan kedaulatan pangan.

Sedangkan Anggota DPR RI Drs HM Idham Samawi yang menjadi salah satu narasumber mengatakan, Rakorwas ini sangat strategis, karena jumlah penduduk Indonesia terus bertambah dan butuh pangan. Kewajiban negara menyediakan pangan itu untuk seluruh rakyat Indonesia. "Rakorwas ini langkah luar biasa untuk menatap masa depan NKRI yang lebih baik," katanya.

(Dev)-d

HARI PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA Napak Tilas Yogya Kota Revolusi

YOGYA (KR) - Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan sebuah strategi yang bertujuan untuk menunjukkan eksistensi kedaulatan RI, baik di level nasional maupun internasional, bahwa kemerdekaan RI benar-benar masih diakui dunia internasional di tengah pelanggaran-pelanggaran kedaulatan oleh Belanda.

Demikian dikatakan Paniradya Pati Kaistimewan DIY, Aris Eko Nugroho SP MSI sehubungan acara Sinau Sejarah Keistimewaan '1 Maret, Hari Penegakan Kedaulatan Negara', yang diselenggarakan Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) DIY, Rabu (1/3), pukul 13.00-16.00 di Bangsal SMA Negeri 3, Jalan Yos Sudarso No 7 Kotabaru, Yogya, dan ditayangkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewan DIY.

Di tengah krisis politik dan keamanan pada level nasional maupun internasional, lanjut Aris, proses dari mulai ide, persiapan, pelaksanaan dan pasca Serangan Umum 1 Maret ini melibatkan berbagai unsur mulai dari TNI, kraton, masyarakat umum dan para pejuang di mana dilandasi semangat patriotisme, nasionalisme dan kebersamaan untuk bersatu menunjukkan serangan yang fatal bagi Belanda.

Kebersamaan ini berdampak pada skala nasional dan internasional, yang pada akhirnya dilaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB), 23 Agustus 1949 dan disetujui 2 November 1949, di mana



KR-Wawan Isnawan
Aris Eko Nugroho SP MSI

eksistensi Kedaulatan RI kembali diakui secara nasional dan internasional. "Peristiwa 1 Maret 1949 ini kemudian diusulkan menjadi Hari Penegakan Kedaulatan Negara," kata Aris.

Serangan Umum 1 Maret yang kemudian dikenal sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022, tanggal 24 Februari 2022, tentunya harus diperlakukan sebagaimana peringatan hari-hari nasional lainnya.

Menurut Aris, kegiatan pokok peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara yaitu pertama, melaksanakan upacara bendera setiap 1 Maret, untuk menghormati jasa para pahlawan dan mengingatkan kembali nilai kesatuan dan nasionalisme untuk menegakkan kedaulatan negara.

Kedua, dapat pula membunyikan sirene atau semacamnya pada pukul 06.00

selama satu menit setiap 1 Maret sebagai tanda mengenang dimulainya Serangan Umum 1 Maret 1949.

Ketiga, melakukan aktivitas nyata dalam pemeliharaan tempat bersejarah seperti tugu, monumen, tetenger dan situs. Keempat, melakukan identifikasi, analisis, dan dokumentasi peristiwa sejarah di tingkat lokal, regional dan nasional agar sejarah lestari dan pendokumentasiannya dapat meningkatkan literasi masyarakat.

Kelima, menyelenggarakan berbagai aktivitas terkait peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dan/atau peristiwa sejarah lainnya.

Dalam acara Sinau Sejarah Keistimewaan '1 Maret, Hari Penegakan Kedaulatan Negara' di SMA Negeri 3 akan diputar video dokumenter berjudul '1 Maret 1949', kemudian dilanjutkan dengan Dialog Keistimewaan bertema 'Napak Tilas Yogya Kota Revolusi' dengan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSI (Paniradya Pati Kaistimewan DIY), Julianto Ibrahim SS MHUM (Sejarawan UGM), dan Drs Isdiyono (Guru Sejarah SMA Negeri 3 Yogya) dengan moderator Wijil Rachmadani.

Acara Sinau Sejarah Keistimewaan yang akan dipandu MC Agus Sunandar dan Alit Jabangbayi ini dimenangkan pula dengan Tari Golek Ayunayun dan musik Padzchestra oleh siswa SMA Negeri 3 serta Kuis Sejarah. Sedangkan Brian yang baru saja meluncurkan single lagu 'Sudah' menjadi bintang tamu yang tampil di puncak acara ini. (Wan)

Pemeriksaan BPK Dorong Akuntabilitas-Transparansi

YOGYA (KR) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY kembali melakukan entry meeting pemeriksaan dalam rangka Pemeriksaan Terinci Laporan Keuangan pada Pemda DIY tahun 2022. Entry meeting diterima Wakil Gubernur (Wagub) DIY Paku Alam X mewakili Gubernur DIY di Ndaalem Ageng, Kepatihan, Yogyakarta, Senin (27/2).

"Pemda DIY menyambut baik adanya entry meeting yang diprakarsai BPK RI ini. Kami berharap pelaksanaan pemeriksaan berjalan lancar, mampu menjadi sistem yang berkelanjutan untuk mendorong kami menjadi lebih baik dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah," kata Paku Alam X.

Wagub DIY menyampaikan, perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda DIY telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 12 tahun terakhir. Meski

Opini WTP bukanlah tujuan akhir, namun peningkatan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal pokok sebagai tujuan utama.

"Untuk perkembangan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dan signifikan. Hal ini menunjukkan komitmen tinggi Pemda DIY, dan di sisi lain juga didukung BPK yang proaktif mendampingi penyelesaian tindak lanjut," terangnya.

Wagub DIY mengatakan, Pemda DIY akan mendukung dan membantu seoptimal mungkin Tim BPK RI yang akan melaksanakan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan pada Pemda DIY tahun anggaran 2022.

Kepala BPK RI Perwakilan DIY Widhi Widayat mengungkapkan, dalam setiap pemeriksaan, Tim BPK

mengacu pada empat tujuan dan sasaran. Pertama, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

"Jangka waktu pemeriksaan terinci ini selama 30 hari kerja, mulai 27 Februari sampai 29 Maret 2023. Sedangkan untuk penyerahan LHP yakni 60 hari setelah penyerahan LKPD, atau pada 20 April 2023 mendatang," imbuhnya.

Widhi menuturkan, kode etik pemeriksaan oleh BPK berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. "Mudah-mudahan semua berjalan lancar, tanpa hambatan. Harapan Pemda DIY untuk kembali meraih Opini WTP bisa tercapai," ujarnya. (Ria)-d

PENGHAPUSAN KEKERASAN PADA PEREMPUAN

Pemerintah Dorong Payung Hukum yang Baik

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dukungannya untuk memastikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penegasan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menerima Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (27/2).

Keterangan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, menyebutkan, Presiden memberikan dukungan untuk memastikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam hal implementasi UU TPKS. "Bapak Presiden juga mendorong adanya payung hukum yang lebih baik bagi perempuan pekerja, khususnya perempuan pekerja rumah tangga," ujar Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani setelah bertemu Presiden.

Dalam pertemuan dengan Presiden, Komnas Perempuan menyampaikan beberapa situasi pen-

ting terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk peningkatan pelaporan kasus kekerasan, khususnya kekerasan seksual.

"Demikian juga dengan situasi perempuan di persoalan konflik dan bencana, perempuan pekerja serta perempuan yang menjadi tahanan berhadapan dengan hukum maupun menghadapi berbagai bentuk penghukuman ataupun perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi," papar Andy.

Di samping itu, Presiden Jokowi dan Komnas Perempuan juga membahas tindak lanjut lebih spesifik dari Kementerian/Lembaga terkait mekanisme non-yudisial dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu pada berbagai rencana aksi nasional.

Beberapa di antaranya rencana aksi nasional HAM, rencana aksi nasional mengatasi ekstremisme yang mengarah kepada terorisme dan kondisi perempuan terhadap pandangan hukum, termasuk misalnya hukuman mati maupun berbagai

situasi kebijakan yang dinilai diskriminatif di beberapa daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasco Ahmad menyatakan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dibahas kembali setelah masa reses selesai. Reses berakhir 13 Maret 2023. "Kami akan agendakan rapat pimpinan dan badan musyawarah," kata Dasco di Kompleks Parlemen.

Agenda itu, katanya, untuk membahas berbagai hal yang masih menggantung atau belum selesai pada masa sidang sebelumnya.

"Kami akan bahas dan kami akan menindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Theresia Iswarini mengatakan pengesahan (RUU PPRT) menjadi undang-undang akan memperkuat citra Indonesia di mata internasional dalam perlindungan pekerja rumah tangga (PRT). (Ant/Obi)-d

MULAI 1 MARET 2023

Pedulilindungi Jadi Satu Sehat Mobile

JAKARTA (KR) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan Aplikasi Pedulilindungi siap bertransformasi secara total menjadi sistem layanan kesehatan terpadu yang disebut Satu Sehat Mobile di seluruh gawai penggunaannya.

"Satu Sehat Mobile itu dari Pedulilindungi. Akan otomatis berubah karena kita tidak ingin menyulitkan masyarakat, jadi kita hanya akan memberitahukan bahwa ada perubahan. Masyarakat tinggal tunggu nanti di tanggal 1 Maret 2023 aplikasi di handphone ini akan berubah sendiri," kata Deputy Chief Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes Agus Rachmanto dalam Siaran Sehat yang diikuti di Jakarta, Senin (27/2).

Agus menuturkan, Satu Sehat Mobile merupakan salah satu keluarga dalam layanan yang ada di platform Satu Sehat. Bentuknya tidak dibuat secara spesifik seperti Pedulilindungi, karena akan menyediakan layanan kesehatan yang lebih luas. Salah satunya mengintegrasikan data rekam medis dan data

layanan kesehatan lainnya ke dalam platform Satu Sehat.

Platform Satu Sehat merupakan terobosan Kemenkes guna mengintegrasikan data rekam medis pasien di fasilitas kesehatan, ke dalam sebuah platform Indonesia Health Service sebagai bentuk konkret mewujudkan pilar keenam dalam transformasi sistem kesehatan yakni transformasi teknologi kesehatan.

Kehadiran Satu Sehat Mobile dinilai mampu mempermudah masyarakat dalam menyusun data kesehatannya secara ringkas dan lebih rapih. Sebab para pengguna bisa melihat sendiri data yang diperlukan, seperti sertifikat vaksinasi atau imunisasi anak lainnya hingga pencatatan jenis obat yang dikonsumsi.

Agus mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir akan tiap fitur yang dihadirkan dalam Satu Sehat Mobile, karena saat ini Indonesia sedang memasuki masa transisi dari pandemi Covid-19 menjadi endemi, maka banyak layanan konsultasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan ataupun rumah sakit di dalamnya dipastikan resmi dan berlisensi. (Ant/Ati)-d

PERSIB KALAH

Bali United Jaga Potensi

SLEMAN (KR) - Bali United FC menjaga potensi Juara Liga 1 2022/2023. Di pekan ke-27, Senin (27/2), Bali United menaekklukkan Persis Solo dengan skor 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, yang membawa tim ini tetap dekat dengan tim papan atas klasemen.

Babak pertama, Bali United unggul 1-0 melalui penalti Ilja Spasojevic menit ke-33. Babak kedua, Persis bangkit dan mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui eksekusi penalti Fernando Rodriguez. Namun setelahnya, serangan Bali United sulit diredam.

I Made Tito Wiratama membawa Bali United kembali unggul dengan golnya pada menit ke-65. Menit 89, Persis harus bermain dengan 10 pemain setelah Jaimerson da Silva Xavier diusir keluar oleh wasit. Dalam posisi ini, Bali United menambah satu gol lewat Yabes Roni di pengujuh pertandingan.

Dengan kemenangan ini, Bali United masih bertahan di posisi keempat dengan 46 poin, hanya ter-

paut lima poin dengan Persija Jakarta di posisi ketiga. Sementara Persis Solo di posisi ke-11 dengan 33 poin hasil 27 pertandingan yang sudah dijalani.

Pada laga lainnya, Persis Bandung mengalami nasib naas saat bertandang ke markas Barito Putera, Stadion Demang Lehman. Persis yang bermain dengan 10 pemain sejak akhir babak pertama, dipaksa menelan kekalahan dengan skor 1-2.

Persis unggul 1-0 di babak pertama melalui gol David da Silva menit 20 meneruskan umpan Beck-

ham Putra. Namun di akhir babak pertama, Persis hanya bermain 10 pemain setelah Teja Pakualam sengaja menghalau bola dengan tangan di luar kotak penalti.

Gol Renan Alves menit 65 membuka kebangkitan tuan rumah. Gol kemenangan Barito Putera pun disarangkan Gustavo Tocantins menit 78. Persis pun gagal memangkas keteringgalan poin dari PSM. Persis mengoleksi 52 poin di posisi kedua, Barito Putera menempati posisi 16 dengan 25 poin, hanya selisih tiga poin dari PSS Sleman. (Yud)-d



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

Pemain Bali United FC Ricky Fajrin (kedua kiri) berebut bola dengan pemain Persis Solo Irfan Bachdim (kiri) dalam pertandingan BRI Liga 1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Hujan 2 Malam, Pati Dikepung Banjir

PATI (KR) - Sejumlah wilayah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah kembali dikepung banjir, Senin (27/2), menyusul curah hujan yang tiada henti selama dua hari terakhir. Banjir terjadi di Kecamatan Pati Kota, Dukuhseti, Gabus dan Juwana.

Dari pantauan wartawan, ketinggian genangan air di jalan desa berkisar 20-70 cm. Banjir menggenangi di Desa Kembang, Ngagel, Dukuh Kedawang, Dukuhseti. Kemudian juga di kawasan bantaran Sungai Silugonggo, Juwana. Seperti Desa Banjarsari dan Mintoba-

suki di Kecamatan Gabus, serta Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati Kota.

Banjir terjadi disebabkan curah hujan yang cukup lebat sejak Sabtu (25/2) lalu. Air tidak bisa lagi tertampung di sungai, sehingga merambah ke kawasan permukiman dan areal pertanian. "Di Kecamatan Dukuhseti sudah tercatat 50 rumah yang kemasukan air, dan 100 hektare areal pertanian terendam banjir," ucap seorang relawan, Edy S.

Beberapa warga di Kecamatan Gabus dan Jakenan membenarkan,

ketinggian air banjir terus bertambah, sehingga mengakibatkan sejumlah rumah mulai kemasukan air. Sedangkan tanaman padi terancam gagal panen.

Pada awal tahun 2023 lalu, puluhan desa di Kabupaten Pati juga diterjang banjir, sehingga menyebabkan kerugian material mencapai ratusan miliar rupiah. Pada pertengahan Januari air mulai surut. Namun untuk Desa Kasyian dan Gadudero di Kecamatan Sukolilo, genangan air belum surut. Jalan alternatif Pati-Kudus di Sukolilo masih terendam banjir. (Cuk)-d